

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan signifikansi sebesar 0,013. Indeks Pembangunan Manusia menengah dan tinggi menunjukkan masyarakat yang sejahtera dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah sehingga kemungkinan Provinsi mendapat opini audit yang baik akan semakin tinggi.
2. Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan signifikansi sebesar 0,023. Masyarakat yang sejahtera dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan pendapatan yang mereka terima dan memiliki pilihan untuk aktif dan kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan Pemerintah sehingga dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik kemungkinan Provinsi menerima opini audit yang baik akan semakin tinggi.
3. Ketidapatuhan regulasi berpengaruh negatif terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan signifikansi sebesar 0,010. Tingginya nominal temuan ketidakpatuhan regulasi menunjukkan adanya kerugian Negara, potensi kerugian Negara, kekurangan penerimaan,

ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan yang tinggi dan pertimbangan pemeriksa sehingga mempengaruhi penerimaan opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh negatif terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan signifikansi 0,000. Banyaknya jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern yang belum memadai dan kemungkinan salah saji material yang tinggi sehingga dapat mengurangi kewajaran Laporan Keuangan dan menjadi pertimbangan pemeriksa dalam memberikan opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tidak berpengaruh terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang tinggi tidak menyebabkan laporan keuangan memiliki salah saji atau kecurangan yang material, maka kewajaran laporan keuangan tetap dapat dipertahankan sehingga tidak berdampak pada opini audit yang diterima Provinsi.
6. Kelemahan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan atas kelemahan struktur pengendalian intern fokus pada keberadaan *standard operating procedure*, satuan pengawasan intern, dan pemisahan tugas yang memadai yang ada pada entitas sehingga ketika terjadi kelemahan pada sistem

pengendalian intern yang lain yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan maka opini audit yang diberikan akan tetap tidak bernilai wajar sehingga kelemahan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kemungkinan opini audit yang diterima Provinsi.

B. Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat melalui indikatornya yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita, ketidakpatuhan regulasi, sistem pengendalian intern melalui indikatornya yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Implikasi dari penelitian ini antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita sebagai indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah terbukti menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sangat penting bagi suatu Provinsi untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup masyarakat yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat serta fasilitas yang dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah seperti adanya kotak saran yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan penerimaan opini audit yang lebih baik.

2. Ketidapatuhan regulasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh negatif terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sangat penting bagi suatu Provinsi untuk lebih memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan keuangan dalam memahami dan menaati regulasi yang berlaku untuk menghindari terjadinya kerugian daerah, potensi kerugian Negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan yang dapat mengurangi kewajaran laporan keuangan dan menurunkan kemungkinan diterimanya opini wajar.
3. Sistem pengendalian intern yang tidak memadai yang memiliki kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terbukti menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sangat penting bagi suatu Provinsi untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan sehingga pengelola dapat melakukan pencatatan dengan akurat dan menyusun laporan sesuai dengan ketentuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diyakini kewajarannya. Sementara kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian intern yang tidak material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tidak akan menyebabkan opini audit tidak wajar atas laporan keuangan.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mengadakan pelatihan rutin yang dapat mendukung kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
2. Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana seperti kotak saran yang terjangkau bagi semua masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan saran dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Terdapat kesulitan dalam mengakses data mengenai materialitas dari setiap nominal dan kasus yang dilaporkan dari pemeriksaan keuangan sehingga informasi mengenai seberapa material kasus yang dilaporkan tidak secara langsung tercantum. Maka Peneliti menyarankan untuk menggunakan *proxy* lain seperti rata-rata nominal per kasus yang dapat mengukur materialitas dari kelemahan sistem pengendalian intern, terutama pada kelemahan sistem sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian intern.
4. Menggunakan *proxy* lain seperti peningkatan opini audit setiap tahun untuk melihat upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangannya.

5. Saran lain bagi penelitian selanjutnya dapat mencoba memperhitungkan karakteristik setiap daerah yang menjadi sampel penelitian, seperti ukuran daerah atau kompleksitas daerah agar hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.